

KADERISASI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NASIONAL

Insan Harapan Harahap

Dosen Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Bakrie
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

email: insan.harahap@bakrie.ac.id

Abstract

Political parties as one of the pillars of democracy have a very important role, one of the most important roles is preparing a national leader. In consequence, they are required to have good recruitment and cadreization mechanisms. In reality, however, the majority of political parties are not currently able to carry out proper recruitment and regeneration mechanisms because of the affection of the political kinship, as well as the instant regeneration mechanisms of artists as they are able to gain votes due to their popularity. As a result, many party cadres who become national leaders are incapable of capturing the duties and responsibilities afforded, and often misuse them for their personal and family interests.

Keywords: cadreization, leadership

Abstrak

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran yang sangat penting, salah satunya adalah mempersiapkan pemimpin nasional. Atas dasar tersebut, partai politik sangat dituntut untuk memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik. Namun kenyataannya, mayoritas partai politik saat ini belum mampu menjalankan pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang semestinya karena partai politik dipengaruhi oleh politik kekerabatan, serta mekanisme kaderisasi instan dari kalangan artis karena dianggap dapat mendulang suara karena popularitasnya. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

Kata kunci: kaderisasi, kepemimpinan

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dengan sebuah kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu perlu dikelola dengan baik dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk mendukung sumber daya yang berkualitas dalam sebuah organisasi perlu adanya proses kaderisasi.

Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pengembangan organisasi. Kaderisasi pun menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Fungsi dari kaderisasi ini juga dapat mempersiapkan atau mencetak

calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasinya. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan seorang kader, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah nyawa dari organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294).

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak. Proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya (Rivai, 2006):

- a. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi
- b. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar
- c. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (Pensiun)
- d. Kematian
- e. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam tulisan ini adalah mekanisme kaderisasi partai dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional.

Pembahasan

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan (Fattah, 2000: 54-56). Dalam definisinya menurut kamus ilmiah populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet dari suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294). Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead (dalam Kartono, 1994: 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk mengerakan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.

Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Ivancevich (2007) rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Cholisin, rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin dkk, 2007: 113).

Berdasarkan pengertian di atas, rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992: 118). Namun dalam kenyataannya, implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya.

Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu (Rivai, 2006: 87):

a. Berkepribadian positif

b. Gigih

c. Mempunyai loyalitas

d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi

e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.

Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli sering kali menggunakan kata yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana ahli tersebut memandang kepemimpinan. Tead (dalam Kartono, 1994: 49) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam memengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan transformasional yang dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1985 (Locander 2002). Kedua konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin (Locander 2002). Sehingga dalam hal ini proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam menggerakkan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan tongkat ideologi dalam suatu partai atau organisasi. Di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalamnya. Kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak lahir begitu saja dari penurunan sifat orang

tua kepada anaknya, melainkan melalui kepribadian dan tingkah laku dari seseorang. Dengan demikian, kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggungjawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berorganisasi.

Dalam hal kepemimpinan, peningkatan kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas kepemimpinan harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain memberdayakan anggota dalam suatu organisasi yang dipimpin. Usaha-usaha tersebut diantaranya:

- a. Berpikir Efektif dalam Menetapkan Keputusan - Berfikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berfikir yang diberikan Tuhan yang maha esa pada hewan, sebagai makhluk ciptaan-Nya yang sama-sama penghuni bumi.
- b. Mengkomunikasikan Hasil Berpikir - Hasil berfikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berfikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi.
- c. Meningkatkan Partisipasi dalam Memecahkan Masalah - Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota organisasi secara efektif dan

efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan.

- d. Menggali dan Meningkatkan Kreativitas - Proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan.

Sehingga dengan adanya kaderisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan ini akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasi. Kaderisasi sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang.

a. Partai Politik sebagai Kaderisasi Kepemimpinan Nasional

Pada era kepemimpinan Soeharto (masa Orde Baru), kehadiran partai politik tidak terlalu diperhitungkan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan partai politik yang ada pada saat itu tidak mampu menjalankan peran dan fungsi yang semestinya, yang disebabkan oleh berkuasanya segelintir elit yang mengendalikan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk menentukan calon-calon yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Secara umum, definisi Partai Politik adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.

Pada saat rezim Soeharto runtuh tahun 1998, peta perpolitikan Indonesia berubah dratis, ditandai dengan dibukanya kran demokrasi yang sebesar-besarnya. Inilah yang menjadi momentum lahirnya partai politik di Indonesia yang sesungguhnya. Dimana partai politik memainkan peran dan fungsinya dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang dapat dilihat dengan munculnya partai-partai baru yang tidak terbendung. Masing-masing dari partai politik yang muncul, memiliki ideologi yang berbeda-beda yang mengusung kepentingan masyarakat plural.

Dalam rezim demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara (Imansyah, 2012: 375), disamping pemilu yang juga menjadi pilar utama demokrasi. Menjadi pilar dalam demokrasi menjadikan partai politik memiliki peranan yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik (Harjanto, 2011: 138). Partai politik dinilai menjadi satu-satunya lembaga penyalur para pemimpin-pemimpin bangsa dan juga pejabat-pejabat kenegaraan karena partai politik memiliki peran, yang salah satunya adalah sebagai rekrutmen politik.

Seperti yang dikatakan Azwar (2008: 2), sebagai lembaga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan berdiri dengan tujuan sebagai alat perjuangan bangsa, secara umum partai politik memiliki peran sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*) (Azwar, 2008: 2). Lebih lanjut Azwar (2008: 2) juga

menjelaskan, pada tahun 2007 dan 2008 masyarakat menolak adanya monopoli sumber rekrutmen politik oleh partai politik. Masyarakat menilai bahwa kepentingan-kepentingan yang diusung oleh partai politik kebanyakan adalah kepentingan lembaga tersebut. Sedangkan tujuan dan cita-cita utama partai politik yaitu sebagai tempat aspirasi dan penyalur kepentingan rakyat, sering diabaikan.

b. Permasalahan Kaderisasi pada Partai Politik

Fungsi-fungsi partai politik sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah/penguasa, terbilang masih lemah sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Performa partai politik yang demikian krusial menyebabkan melemahkan peran dan fungsinya sebagai lembaga/organisasi negara. Lemahnya performa partai politik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik,. Justru yang tumbuh dan berkembang pesat adalah menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalegan kader secara instan. Menurut Direktur Eksekutif Pol-Treking Institute Hanta Yuda, politik kekerabatan merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada masyarakat. Parpol juga harus jelas kerjanya dalam rekrutmen politik (antaranews.com).

Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan

anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen) (Azwar, 2008: 3). Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan hasil dari pengkaderisian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu parpol menentukan dari daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik akan menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula, begitu pun sebaliknya. Dihasilkannya kader-kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut.

Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya politik kekerabatan. Tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan

memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang-orang yang memiliki sumberdaya yang terbatas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan, sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit bahkan dari keluarga yang sama, maka sumberdaya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka. Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama. Seperti yang terjadi di Banten, dimana politik kekerabatan menguasai hampir seluruh posisi kepemimpinan strategis di provinsi tersebut. Pada akhirnya dapat dibuktikan setelah ditangkapnya Gubernur Banten masa itu Ratu Atut Chosiyah, baru terbongkar bahwa beberapa proyek dan program daerah daerah dilakukan dan ditujukan untuk memperkaya diri dan kerabatnya.

Tabel. 1. Beberapa Politik Kekerabatan di Indonesia

<p>Presiden: Susilo Bambang Yudoyono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edhie Baskoro Yudhoyono (Anak): Sekjen Partai Demokrat (2010-2015), Anggota DPR (2009-2014), Wakil Ketua Umum KADIN • Hartanto Edhie Wibowo (Adik Ani Tudhoyono): Anggota DRP (2009-2014), Ketua Departemen BUMN Partai Demokrat (2010-2015) • Hadi Utomo (Adik Ipar): Ketua Umum Partai Demokrat (2005-2010), Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (2010-2015) • Nurcahyo Anggoro Jati (anak Hadi Utomo): 	<p>Gubernur Sulawesi Selatan: Syahrul Yasin Limpo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indira Tuta Chunda (Anak): Anggota DPR (2009-2014) • Ichsan Yasin Limpo (Adik): Bupati Gowa (2010-2015) • Haris Yasin Limpo (Adik): Anggota DPRD Kota Makassar (2004-2009) • Tenri Olle (Adik): Anggota DPRD SulSel (2009-2014) • Adnan Purichta: Anggota DPRD SulSel (2009-2014)
--	--

Anggota DPR (2009-2014) <ul style="list-style-type: none"> • Agus Hermanto (adik Hadi Utomo): Anggota DPR (2009-2014) 	Gubernur Kalimantan Tengah: Teras Narang <ul style="list-style-type: none"> • Atu Narang (Kakak): Ketua DPRD Kalteng (2009-2014) • Aries Narang (Keponakan): Anggota DPRD Kalteng (2009-2014) • Asdy Narang (Keponakan): Anggota DPRD Kalteng (2009-2014)
Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri <ul style="list-style-type: none"> • Taufiek Kiemas (Suami): Ketua MPR (2009-2014), Ketua MPP PDIP • Puan Maharani (Anak): Anggota DPR (2009-2014), Ketua DPP PDIP • Guruh Soekarnoputra (Adik): Anggota DPR (2009-2014) • Puti Guntur Soekarnoputri (Keponakan): Anggota DPR (2009-2014) • Nazarudin Kiemas (Adik Ipar): Anggota DPR (2009-2014) 	
	Anggota DPR: Pupung Suharis (2009-2014) <ul style="list-style-type: none"> • Hendy Boedoro (Adik): Bupati Kendal (2000-20015, 2005-20007) • Don Murdono (Adik): Bupati Sumedang (2003-2008, 2008-2013)

(Sumber: Harjanto, (2011))

Selain politik kekerabatan, banyak parpol yang mengusung calonnya untuk menduduki posisi tertentu, baik pusat maupun daerah, atas dasar popularitas dan ketenaran seperti yang dimiliki artis. Mereka menganggap popularitas/ ketenaran calon yang diusung akan dapat meraup simpati dan suara masyarakat dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg. Rekrutmen artis dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg secara instan tanpa melalui pola rekrutmen yang seharusnya dan tidak melalui mekanisme kaderisasi yang berlaku, mengartikan bahwa hal tersebut telah memotong mata rantai proses kaderisasi internal partai politik. Ini tentu akan menciptakan suatu kondisi ketidakadilan di dalam internal partai itu sendiri. Kader yang telah mengabdikan dan berdedikasi serta meniti karir sebagai kader dalam partai justru tertutup kesempatannya untuk menjadi seorang calon dalam Pilkada, Pilgub maupun Pileg, jika dibandingkan dengan artis yang mendapatkan hak istimewa untuk maju. Fenomena ini merupakan lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai

politik untuk mencalonkan orang yang populer (Mietzner, 2009).

Model rekrutmen dan kaderisasi secara instan ini menjadikan artis sebagai alat oleh partai politik untuk mendulang suara. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi industri yang mengikuti hukum ekonomi. Penawaran bukan didasarkan pada perjuangan untuk kepentingan umum, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Sementara itu, kader lama yang kurang populer tidak memperoleh 'panggung', walaupun ada, akan dimasukkan sebagai cadangan. Kurangnya penghargaan terhadap kader lama, sangat berpotensi menimbulkan runtuhnya kekuatan internal suatu partai politik. Partai politik tampaknya lebih mementingkan kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga abnormalitas maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan dalam Pilkada, misalnya (Harjanto, 2011: 139).

Berdasarkan paparan di atas, partai politik tak bisa lagi diandalkan sebagai

sumber rekrutmen kepemimpinan nasional karena dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti rekrutmen politik dan proses kaderisasi, partai politik tidak mampu melakukannya secara konsisten, berjenjang, dan terstruktur. Lemahnya partai politik dalam merekrut kepemimpinan bukanlah satu dari sekian kesalahan partai politik dalam menciptakan kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, melainkan ada juga sistem kepartaian, regulasi, sistem pemilu, dan bahkan rezim yang berkuasa saat itu yang juga turut serta menyumbang lemahnya peran dan fungsi parpol yang sesungguhnya (Harjanto, 2011: 158).

Penutup

Meningkatkan kualitas kepemimpinan suatu keharusan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam organisasi. Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dapat dimulai dari rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Untuk lingkup kepemimpinan

nasional, mekanisme kaderisasi dalam suatu partai politik sangat penting, sebab dalam era demokrasi saat ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama karena peranannya yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan nasional dan pengisian jabatan publik. Namun kenyataannya, mayoritas partai yang berdiri saat ini belum mampu memaksimalkan mekanisme kaderisasi ataupun pola rekrutmen yang semestinya sehingga kerap kali terjadi politik kekerabatan. Selain itu, partai politik sering memotong mata rantai kaderisasi dengan mengutamakan calon Pilkada, Pilgub maupun Pileg dari kalangan artis yang rekrut secara instan karena faktor popularitas dengan harapan dapat mendulang suara untuk kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, banyak kader partai yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas dan tanggungjawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

Referensi

Azwar, Rully Chairul. (2008). Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar (diakses melalui www.parlemen.net).

Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.

Fattah, Nanang. 2000. Landasan Management Pendidikan. Cet ke-3. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Harjanto, Nico. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. Jurnal Analisis CSIS, (40) 2: 138-159.

Imansyah, Teguh. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan

Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), 1 (3): 375-395.

Ivancevich, J.M. (2007), Human Recourse Management, Singapore: McGraw-Hill.

Kartono, Kartini. 1994. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mietzner, M. (2009). Political Opinion Polling in Post Authoritarian Indonesia Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation. Bijdragen tot de Taal, Land-en.

- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan A- Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya.
- Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Cet ke-3. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Rivai, veithzal. 2007. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. Cetakan ke-6.
- Locander, W.B., F. Hamilton, D. Ladik & J. Stuart. 2002. Developing a leadership-rich culture: The missing link to creating a market-focused organization. *Journal of Market-Focused Management*. 5: 149-163.
- <https://www.antaraneews.com/berita/372467/pengamat-politik-kekerabatan-merusak-sistem-kaderisasi-partai>